

**PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB**  
**Jalan Kartini No. 02 Singaraja**

Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447  
Website : [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id) - Email : [pnsingaraja@yahoo.co.id](mailto:pnsingaraja@yahoo.co.id)

---

**SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**TRIWULAN II**



Disusun Oleh :

**TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B**

**TAHUN 2024**



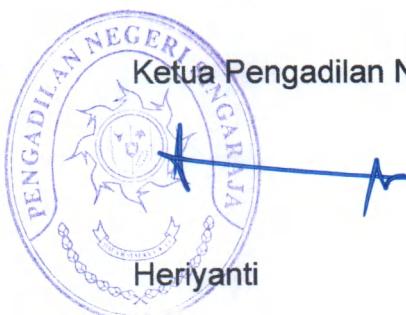
## LEMBAR PENGESAHAN

### LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN II PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

Disahkan di Singaraja

Pada Tanggal 1 Juli 2024



Ketua Pengadilan Negeri Singaraja,

Heriyanti

Koordinator Tim Survey,

I Nengah Karyasa

## KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, guna tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang akan dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Singaraja mengadakan survey ini.

Survey ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani. Survey ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Singaraja, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survey dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Singaraja dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Singaraja.

Singaraja

1 Juli 2024

Koordinator Tim Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi,

I Nengah Karyasa



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Landasan Hukum .....	2
1.4 Sasaran Kerja.....	3
1.5 Rencana Kerja.....	3
BAB II METODOLOGI	
2.1 Metode penelitian .....	5
2.2 Populasi dan Sampel.....	5
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisa.....	5
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	5
2.5 Teknik Analisa Data.....	6
2.6 Tahap Pelaksanaan.....	6
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI .....	9
3.1 Profil Responden.....	9
3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator.....	11
3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	16
BAB IV PENUTUP .....	18
4.1 Kesimpulan.....	18
4.2 Saran .....	19
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian/Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat yang terkait dengan pelayanan di lingkungannya. Zi menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

### **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

### **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survey (SISUPER) Pada Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya

#### **1.4.Sasaran Kerja**

- 1. Terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.
- 2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

#### **1.5. Rencana Kerja**

##### **1.5.1 Persiapan**

Sebelum melaksanakan survey persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- **Penetapan Pelaksana**

Dilaksanakan Sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya Penyiapan Bahan

- a) Kelengkapan peralatan survey

- **Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data**

- a) Jumlah Responden.

- b) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- Penyusunan Jadwal
  - a) Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

#### **1.5.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.5.3 Metode Survey**

Survey dilaksanakan dalam interval waktu 3 bulan sekali.

## BAB II

## METODOLOGI

### 2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### 2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Singaraja. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

### 2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Singaraja. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

### 2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka melalui aplikasi SI SUPER. Pengumpulan data dilaksanakan pada

rentang waktu sepuluh minggu dan dengan jumlah data minimal 110 (seratus sepuluh) responden. Selanjutnya data yang masuk dalam aplikasi SISUPER di ambil data ADK (Arsip data Komputer).

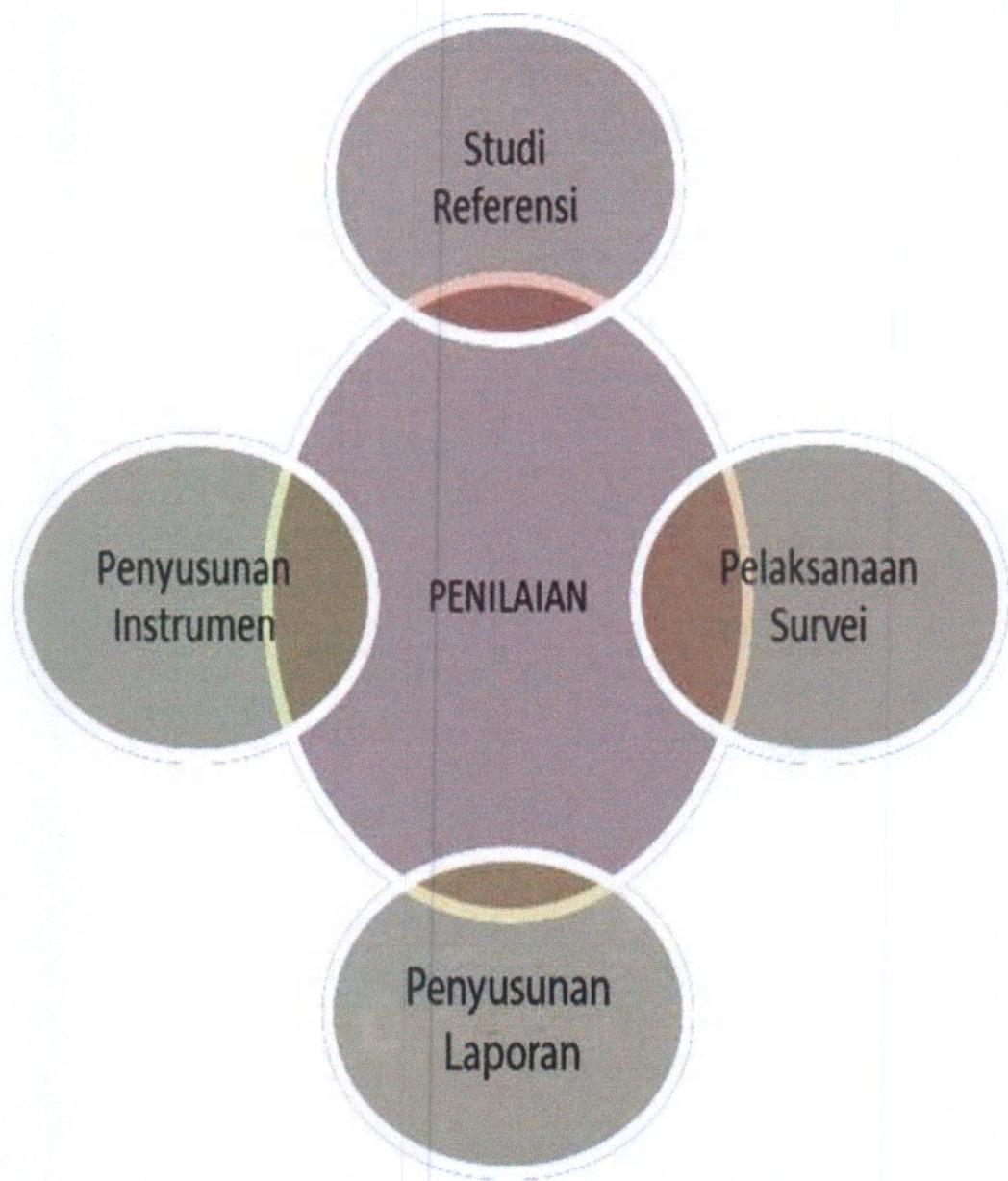
## 2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk scoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut: *Pertama*, menentukan bobot total dari masing- masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6 Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Gambar 1**  
**Model Alur Penyusunan Survey IPA menuju Zona Integritas**



**Tabel 1**  
**Ruang Lingkup Survey Indeks Persepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 2**  
**Nilai Persepsi Korupsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25 - 43.75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76-62.50	43.76-62.50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51-3.25	62.51 -81.25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	A	Bersih dari Korupsi

## BAB III

### INDEKS PERSEPSI KORUPSI

#### 3.1 Profil Responden

##### 3.1.1 Umur Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu usia 29 sampai dengan 39 tahun. Bagi kelompok usia di atas 39 tahun jumlah responden semakin mengecil.

**Tabel 3**  
**Umur Responden**

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1.	18 Tahun s/d 28 Tahun	37	20,56%
2.	29 Tahun s/d 39 Tahun	84	46,67%
3.	40 Tahun s/d 49 Tahun	38	21,11%
5	50 Tahun s/d 59 Tahun	19	10,56%
6	>59 Tahun	2	1,10%
Jumlah		180	100%

##### 3.1.2 Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan jenis kelamin yaitu Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki.

**Tabel 4**  
**Jenis Kelamin Responden**

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-Laki	95	52,78%
2	Perempuan	85	47,22%
Jumlah		180	100%

### 3.1.3 Pendidikan Terakhir Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Singaraja mayoritas memiliki latar Sekolah Menengah Atas serta Strata Satu yang menduduki peringkat kedua.

**Tabel 5**  
**Pendidikan Terakhir Responden**

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Tidak sekolah/SD	7	3,89%
2	SMP	15	8,33%
3	SMA	98	54,44%
4	Diploma	7	3,89%
5	S1	50	27,78%
6	S2	3	1,67%
7	S3	0	0,00%
Jumlah		180	100%

### 3.1.4 Pekerjaan Utama Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 50% responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pekerjaan Lainnya yang berjumlah 90 orang dari total responden 180 orang. Responden yang memiliki pekerjaan lainnya menduduki peringkat kedua.

**Tabel 6**  
**Pekerjaan Utama Responden**

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	PNS	4	2,22%
2	TNI/POLRI	0	0,00%
3	Swasta	60	33,33%
4	Wirausaha	14	7,78%
5	Tenaga Kontrak	12	6,67%
6	Pekerja lainnya	90	50%
Jumlah		180	100%

### **3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator**

#### **3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,989 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

**Tabel 7**  
**Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Tidak sesuai prosedur	1	0	0,00%	3,989
2	Jarang sesuai prosedur	2	0	0,00%	
3	Sering sesuai prosedur	3	2	1,11%	
4	Selalu sesuai prosedur	4	178	98,89%	
Jumlah			180	100%	

#### **3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,994 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

**Tabel 8**  
**Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu meminta imbalan	1	1	1,01%	3,994
2	Sering meminta imbalan	2	0	0,00%	
3	Jarang meminta imbalan	3	1	0,56%	
4	Tidak meminta imbalan	4	179	99,44%	
Jumlah			180	100%	

### 3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,994 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

**Tabel 9**  
**Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	3,994
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang	3	1	0,56%	
4	Tidak pernah	4	179	99,44%	
Jumlah			180	100%	

### 3.2.4 Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,972 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

**Tabel 10**  
**Indeks pada Indikator Transaksi Biaya**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	3,972
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang	3	5	2,78%	
4	Tidak pernah	4	175	97,22%	
Jumlah			180	100%	

### 3.2.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,994 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

**Tabel 11**  
**Indeks pada Indikator Biaya Tambahan**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	3,994
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang	3	1	0,56%	
4	Tidak pernah	4	179	99,44%	
Jumlah			180	100%	

### 3.2.6 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

**Tabel 12**  
**Indeks pada Indikator Hadiah**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang/pernah	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	180	100%	
Jumlah			180	100%	

### 3.2.7 Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

**Tabel 13**  
**Indeks pada Indikator Transparansi Biaya**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	180	100%	
Jumlah			180	100%	

### 3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja sangat Bersih dan bebas dari Korupsi.

**Tabel 14**  
**Indeks pada Indikator Percaloan**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang/pernah	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	180	100%	
Jumlah			180	100%	

### 3.2.9 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dan bebas dari Korupsi.

**Tabel 15**  
**Indeks pada Indikator Perbuatan Curang**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang/pernah	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	180	100%	
Jumlah			180	100%	

### 3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

**Tabel 16**  
**Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang/pernah	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	180	100%	
Jumlah			180	100%	

### 3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja sebesar **3,99/99,86%**

Tabel 17

#### Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja

No	Ruang Lingkup	Nilai rata-rata IPK	IPK Tertimbang
1	Manipulasi Peraturan	3,989	0,399
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,994	0,399
3	Menjual Pengaruh	3,994	0,399
4	Transaksi Biaya	3,972	0,397
5	Biaya Tambahan	3,994	0,399
6	Hadiah	4,000	0,400
7	Transparansi Biaya	4,000	0,400
8	Percaloan	4,000	0,400
9	Perbuatan Curang	4,000	0,400
10	Transaksi Rahasia	4,000	0,400
	Jumlah	39,944	3,994
<b>INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b>			<b>3,99 / 99,86%</b>

Dari tabel di atas bahwa Indeks Pengadilan Negeri Singaraja dengan nilai **39,994** jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka interval 3.26-4.00./ Nilai Interval Konversi IPK 81.26-100.00.

Tabel 18

#### Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25,00-43.75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	A	Bersih dari Korupsi

## NILAI SIPAK DALAM APLIKASI SISUPER

The screenshot shows a web-based application titled "SISUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | Diklat". The main content area displays survey results for the period from April 1 to June 30, 2024. The results are presented in a large green font: **3,99 / 99,86 %**. Above this, the survey title is listed: SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NILAI INDEKS. Below the main result, there is a table summarizing respondent demographics:

KATEGORI	DETALI	PERSENTRASI (%)
JUMLAH	180 RESPONDEK	-
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 95 ORANG PEREMPUAN : 85 ORANG	-
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG SD : 6 ORG SMP : 15 ORG SMU : 98 ORG Diploma 1 : 6 ORG PNS : 4 ORG TNI : 0 ORG POLRI : 0 ORG LAINNYA : 98 ORG	Diploma 2 : 0 ORG Diploma 3 : 1 ORG S1 : 50 ORG S2 : 3 ORG S3 : 0 ORG SWASTA : 60 ORG WRAUSAHA : 14 ORG TENAGA KONTRAK : 12 ORG
PEKERJAAN	-	-

At the bottom of the application window, there is a copyright notice: Copyright © 2024. All Rights Reserved. Waktu Eksekusi: 10.5659, Penggunaan Memori: 1.84MB. The system also includes a search bar and various icons for file operations.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Singaraja diperoleh informasi bahwa Pengadilan Negeri Singaraja memiliki nilai Indeks Persepsi Korupsi tertimbang 3,99 (99,86%) atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,989
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,994
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,994
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,972
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,994
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000.

Tiga unsur terendah Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi yaitu:

1. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks nilai 715 dengan indeks sebesar 3,972.
2. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks nilai 718 dengan indeks 3,989.
3. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat nilai 719 dengan indeks 3,994.

Tiga unsur tertinggi Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi yaitu:

1. Indikator Hadiah, mendapat nilai 720 dengan indeks 4,000.
2. Indikator Transparansi Biaya, mendapat nilai 720 dengan indeks 4,000.
3. Indikator Percaloan, mendapat nilai 720 dengan indeks 4,000.

#### 4.2 Saran

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Singaraja Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja masuk kategori kinerja **Bersih dari Korupsi**. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transaksi Biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Maka perlu ditekankan kembali bahwa dalam pelayanan di Pengadilan Negeri Singaraja sangat transparan, tanpa perantara oknum tertentu dan mudah dalam memperoleh informasi mengenai tarif/biaya baik melalui website maupun melalui petugas PTSP. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan persepsi atau anggapan korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Singaraja.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**1. SK PEMBENTUKAN TIM SURVEY**

**2. PERHITUNGAN INDEKS**

- **NILAI INDEKS**
- **DATA RESPONDEN**
- **NILAI PER UNSUR**



KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NOMOR : 016 /KPN/SK.HM1/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)  
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) serta mendukung Reformasi Birokrasi Pengadilan, perlu dibentuk Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Singaraja;
  - b. Bahwa komitmen tersebut tercantum dalam amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani;

- c. Bawa tujuan diadakannya survei untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna pengadilan;
- d. Bawa sasaran diadakannya survei adalah :
  - 1) mendorong partisipasi pengguna pengadilan sebagai pengguna layanan pengadilan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan,
  - 2) mendorong penyelenggara pelayanan pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
  - 3) mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan pengadilan.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 Sekaligus Dalam Upaya Memenuhi Persyaratan Untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 518/DJU/SK/OT01.3/4/2023 Tentang Pengisian Survey Mandiri Zona Integritas Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

#### M E M U T U S K A N

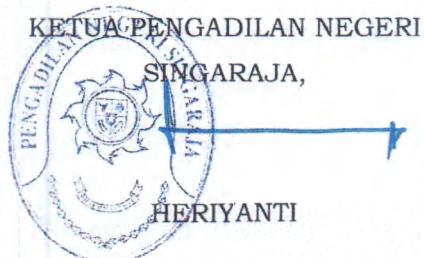
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA TENTANG TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA.

- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Singaraja.
- KEDUA : Tim survei secara bertahap menyampaikan kepada Ketua, mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan tahap penyajian hasil survei.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 16 Januari 2024

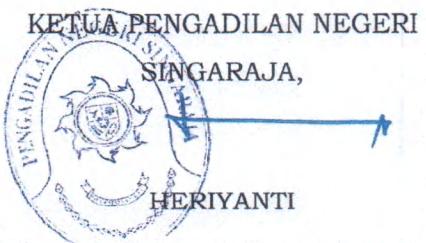


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA  
 PENGADILAN NEGERI SINGARAJA  
 NOMOR : ab / KPN/SK.HM1/I/2024  
 TANGGAL : 16 JANUARI 2024

TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)  
 PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NO	NAMA, PANGKAT/GOL RUANG & NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	HERIYANTI, S.H., M.HUM. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA TK I (IV/b) NIP. 198003252002122004	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2	I NENGAH KARYASA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 197002091993031005	PANITERA MUDA HUKUM	KOORDINATOR
3	I NYOMAN RAI SUTIRKA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 196905151992031005	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
4	MADE OKA SARASMIJAYA, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198605152011011021	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
5	KETUT SUMAWAN, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 196910141993031004	KA. SUBBAG UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA
6	I MADE SATRYAWAN, S.E. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 197205132006041003	JURUSITA	ANGGOTA
7	IDA AYU PUTU MARIANI Pangkat/Gol Ruang: PENATA (III/c) NIP. 196703281994032003	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
8	MADE WEDANI, S.E., S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA TK I (III/b) NIP. 198809102009122002	JURUSITA	SEKRETARIS
9	DEWA AYU INDAH KRISNAYANTI, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA TK I (III/b) NIP. 199512292019032013	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
10	TITIK KURNIYATI, A.Md. Pangkat/Gol Ruang: PENGATUR (II/c) NIP. 199701132022032010	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	ANGGOTA

Ditetapkan di Singaraja  
 Pada tanggal 16 Januari 2024



## Lampiran : Nilai Indeks

Pelaporan Elektronik Direktorat sISUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | Dir

Preview Publikasi

Indeks Total Data Urun Responden Data Demos Responden Data Utur Refleksiden Data Layanan Nisi Per Utur

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA  
NILAI INDEKS

**3,99 / 99,86 %**

Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024

KATEGORI	DETAL	PERSENTASE
JUMLAH	180 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 95 ORANG PEREMPUAN : 85 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG SD : 6 ORG SMP : 15 ORG SMU : 98 ORG Diploma : 6 ORG PNS : 4 ORG TNI : 0 ORG POLRI : 0 ORG LAINNYA : 90 ORG	Diploma 2 : 0 ORG Diploma 3 : 1 ORG S1 : 58 ORG S2 : 3 ORG S3 : 0 ORG SWASTA : 60 ORG WRAU/SAMA : 14 ORG TENAGA KONTRAK : 12 ORG
PEKERJAAN		

Copyright © 2024. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. All Rights Reserved. Waktu Eksekusi : 10.5659, Penggunaan Memori : 1.84MB

09:28 30/06/2024

siSUPER (SPA, SKM, HARIAN) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum















Kode Responden	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekan	
	67A81C8CBD No. HP 81338873588															
82	Gede Maheru Teja Yasa R-099794-IPAK- AF7EB654CE No. HP 81337367688	BALI	22 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Mei 2024
83	Putu Kristyanti R-099794-IPAK- 6C958633CA No. HP 087861857389	BALI	41 Tahun Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Mei 2024
84	Kadek Ayu Novafera Oktavia R-099794-IPAK- BECC4F75BB No. HP 081246962881	BALI	48 Tahun Perempuan	SMUWIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Mei 2024
85	Luh Sari R-099794-IPAK- 5437455E8E No. HP 81237919124	BALI	41 Tahun Perempuan	SMPLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 April 2024
86	Ketut Ariani R-099794-IPAK- B5C067EB8E No. HP 895410784095	BALI	30 Tahun Perempuan	SMPLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 April 2024
87	GUSTI AYU MADE ARDANI R-099794-IPAK- D329E2C92B No. HP 81779907465	BALI	40 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 April 2024
88	SAYU KETUT PARSINI R-099794-IPAK- 25F705B6FE No. HP 81339459011	BALI	35 Tahun Perempuan	SMPLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 April 2024
89	Gede Wijana R-099794-IPAK- 020459C068 No. HP 82247782728	BALI	57 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 April 2024
90	Nyoman Sarjana, S.E. R-099794-IPAK- 74DFADF54E No. HP 87863175129	BALI	55 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 April 2024
91	Ni Putu Eli R-099794-IPAK- FDF2B941C2 No. HP	BALI	37 Tahun Perempuan	SMUWIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 April 2024



















## Lampiran : Nilai per Unsur